


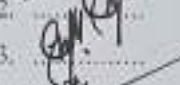

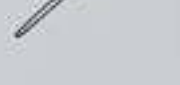
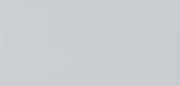
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN- INDONESIA

Panitia Ujian Akhir Meja Hijau Program Studi Ekonomi Pembangunan, jenjang Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi Berdasarkan SK BAN-PT No. 11920/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021, dengan ini menyatakan bahwa :

NAMA : ELZA MONALISAN HUTAURUK
NPM : 20530010
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) pada Hari Jumat, 19 April 2024 dinyatakan LULUS.

Panitia Ujian,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Martin Luter Purba, S.E., M.Si	1. 
2. Sekretaris	: Dr. Nancy Nopeline, S.E., M.Si	2. 
3. Penguji Utama	: Dr. Nancy Nopeline, S.E., M.Si	3. 
4. Anggota Penguji	: Elvis F Purba, S.E., M.Si	4. 
5. Pembela	: Martin Luter Purba, S.E., M.Si	5. 



Dekan


(Dr. Elva Anung Siallagan, S.E., M.Si)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, dimana kesejahteraan hidup mereka mengalami peningkatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, maka dari itu masyarakat dan juga pemerintah Indonesia mulai melaksanakan pembangunan nasional di segala sektor, sehingga pemerintah membutuhkan modal yang cukup besar.

Pembangunan ekonomi juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja setiap negara mempunyai tujuan yaitu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan pembangunan selain meningkatkan pendapatan nasional rill, dapat juga menaikkan produktivitas di suatu negara. Pembangunan di suatu wilayah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam hal mengumpulkan modal guna meningkatkan dan melancarkan segala proses pembangunan. Tetapi, pemerintah masih mengalami kesulitan dalam menyediakan modal besar untuk mempercepat pembangunan tersebut. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan sumber modal.

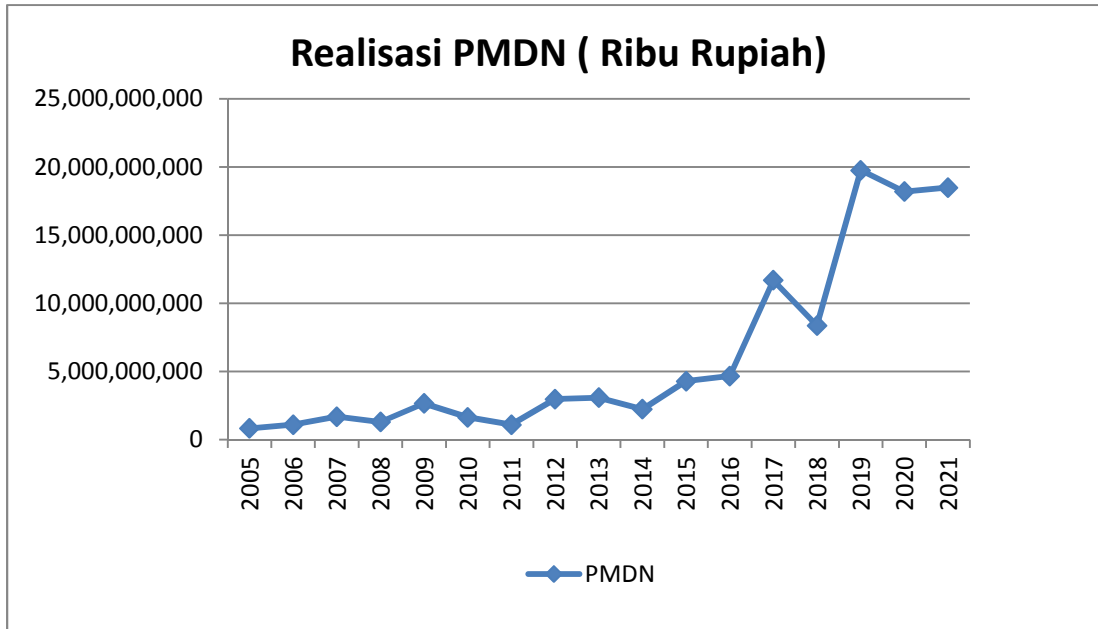
Keterbatasan dana merupakan masalah yang cukup serius. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal tersebut, maka pemerintah mendorong adanya penanaman modal atau investasi untuk dijadikan sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan untuk mengejar satunya pembiayaan tersebut bersumber dari PMDN.

Tingkat investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini didorong oleh banyaknya jumlah investor lokal yang semakin percaya untuk berinvestasi di Indonesia, dikarenakan berlimbahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Peningkatan investasi tentu saja juga mendorong peningkatan investasi di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan dan juga sedang marak-maraknya melaksanakan pembangunan pada setiap sektor, seperti yang di ketahui saat ini banyak perbaikan dan pelebaran jalan di beberapa daerah Sumatera Utara. Tentu saja kegiatan ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga pemerintah terus berusaha menarik investor terutama investor dalam Negeri supaya berinvestasi di Sumatera Utara dalam melakukan pembangunan (Dzulfaroh, 2022).

Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, Sumatera Utara terbilang memiliki tingkat investasi yang cukup tinggi, karena merupakan salah satu provinsi yang memiliki letak geografis yang strategis serta memiliki sumber daya alam yang terbilang cukup melimpah dilihat dari segala sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan juga perikanan, serta pariwisata dimana kawasan wisata yang ada di Sumatera Utara cukup banyak dan diminati oleh masyarakat dalam maupun luar negeri, dimana hal ini dapat digunakan sebagai daya tarik para investor untuk berinvestasi guna untuk meningkatkan pembangunan di Sumatera Utara.

Investasi dalam negeri di Sumatera Utara cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2005-2011, tetapi di tahun 2012 hingga 2021 investasi dalam Negeri cenderung mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2011 PMDN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 1.625.438.000 turun sebesar 0,32% menjadi 1.094.055.000 yang disebabkan karena

dampak dari krisis global yang belum kembali pulih selain itu juga isu kenaikan harga minyak dunia yang menimbulkan kekhawatiran bagi pengusaha untuk berinvestasi.



Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS)

Gambar 1.1 Jumlah PMDN di Sumatera Utara

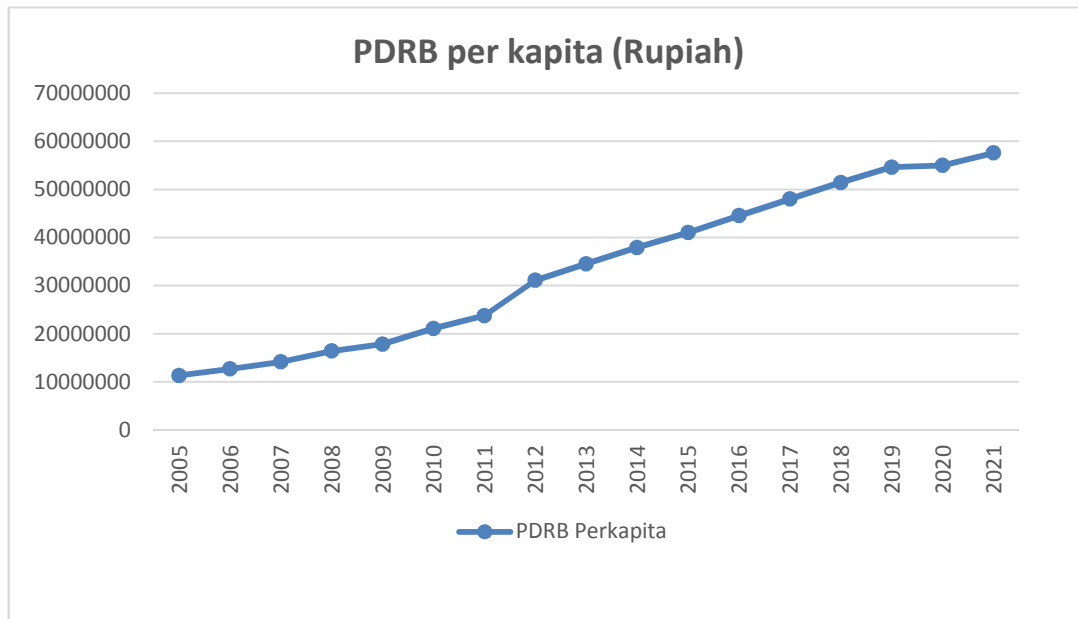
Dilihat dari gambar 1.1 pada tahun 2012 hingga 2017 investasi terus mengalami peningkatan yang cukup drastis dimana pada saat itu Sumatera Utara dapat menarik investor yang bergerak di berbagai bidang, tentu saja dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan investasi dalam negeri yang ada di Sumatera Utara, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang luas di Sumatera Utara dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi dan kerjasama ekonomi. Tentu saja kerjasama ini juga dapat memajukan suatu daerah sehingga pendapatan daerah juga ikut meningkat dikarenakan adanya perusahaan yang didirikan di daerah tersebut dapat menarik dan mempekerjakan para tenaga kerja. Di tahun 2018 investasi mengalami penurunan yang cukup pesat yaitu dari 11.683.600.000 ribu rupiah turun 0,28% menjadi 8.371.800.000 ribu rupiah, hal ini diakibatkan karena kondisi perekonomian global yang belum membaik sehingga

memperlambat investasi, dan juga dimana perusahaan yang telah mendapat izin dari awal untuk berinvestasi ternyata pada saat akan melakukan investasi tersebut memiliki kendala atau tidak sesuai dengan kesepakatan (Sari, 2019).

Menurut Sugiarto (2019) penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu dari 8.371.800.000 ribu rupiah meningkat sebesar 0,55% menjadi 19.749.000.000 ribu rupiah, hal ini didukung oleh Pemerintahan provinsi Sumatera Utara yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP No 24 tahun 2019) tentang pemberian intensif dan kemudahan untuk berinvestasi, sehingga dengan itu Sumatera Utara mendapatkan peluang dan kerja sama untuk berinvestasi. Peningkatan investasi ini tentunya dapat mendorong pembangunan ekonomi di Sumatera Utara

Adapun faktor yang dapat mendukung investasi adalah PDRB Perkapita, karena PDRB ini merupakan cerminan dari daya beli masyarakat ataupun pasar di daerah tersebut. Dimana jika daya beli masyarakat di suatu wilayah tinggi maka akan menarik minat investor untuk berinvestasi dan menyakinkan para investor dari segi pendapatan di daerah tersebut.

PDRB per kapita di Sumatera Utara dari tahun 2005-2021 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan PDRB per kapita ini didorong dari sektor manufaktur dan sektor perdagangan dan jasa. Adapun penyumbang terbesar PDRB di Sumatera Utara adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kebijakan dalam mengembangkan potensi di daerahnya. Kontribusi yang diberikan setiap daerah dapat membuat kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini pula yang membuat pemerintah pusat membutuhkan dana untuk pengembangan setiap potensi yang dimiliki daerah, adapun dana tersebut diharapkan diperoleh dari investasi luar maupun dalam negeri.



Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS)

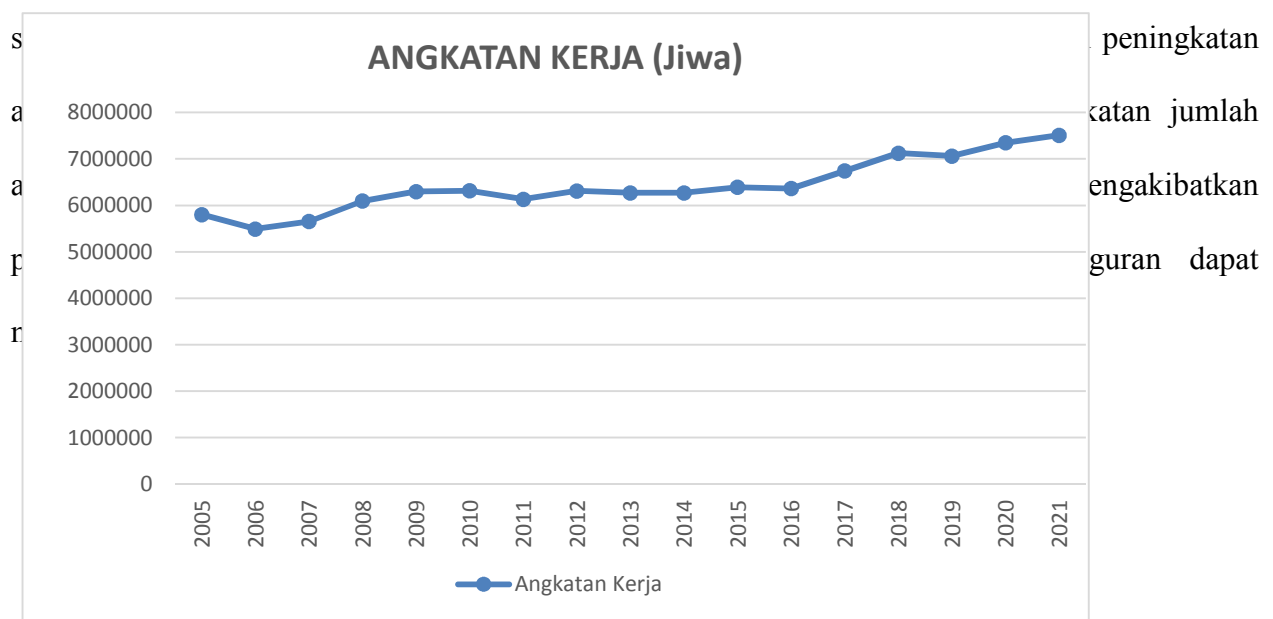
Gambar 1.2 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Sumatera Utara

Berdasarkan gambar 1.2 bahwa PDRB per kapita mengalami peningkatan yang cukup pesat di tahun 2012 yaitu sebesar 0,30% yaitu dari 23.778.381 rupiah menjadi 31.109.349 rupiah, kemudian dan di meningkat tiap tahun hingga di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,047% dari 54.979.044 rupiah menjadi 57.574.032.

PDRB per kapita dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan keadaan ekonomi regional yang dapat mempengaruhi minat para investor termasuk investor dalam negeri. Seperti yang diketahui bahwa PDRB dapat mengukur total pemasukan ataupun pengeluaran perekonomian dibidang barang dan jasa. Dengan memperhatikan pemasukan dan pengeluaran yang cukup tinggi, PDRB per kapita juga dapat digunakan sebagai alat ukur kemakmuran rata-rata seseorang.

Peranan PDRB terhadap investasi sangat penting karena pendapatan masyarakat yang tinggi tentunya dapat memperbesar permintaan barang dan jasa, tingginya permintaan ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan kemudian mendorong dilakukannya kegiatan investasi lebih banyak lagi guna untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi di suatu daerah. Dengan ini dinyatakan bahwa PDRB dijadikan salah satu acuan bagi para investor untuk memahami kondisi dari daerah yang diinginkan.

Pada Gambar 1.3 dilihat bahwa perkembangan angkatan kerja dari tahun tahun 2008 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Peningkatan angkatan kerja ini tentu saja dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi yang juga terus meningkat. Jumlah angkatan kerja ini meningkat



Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS)

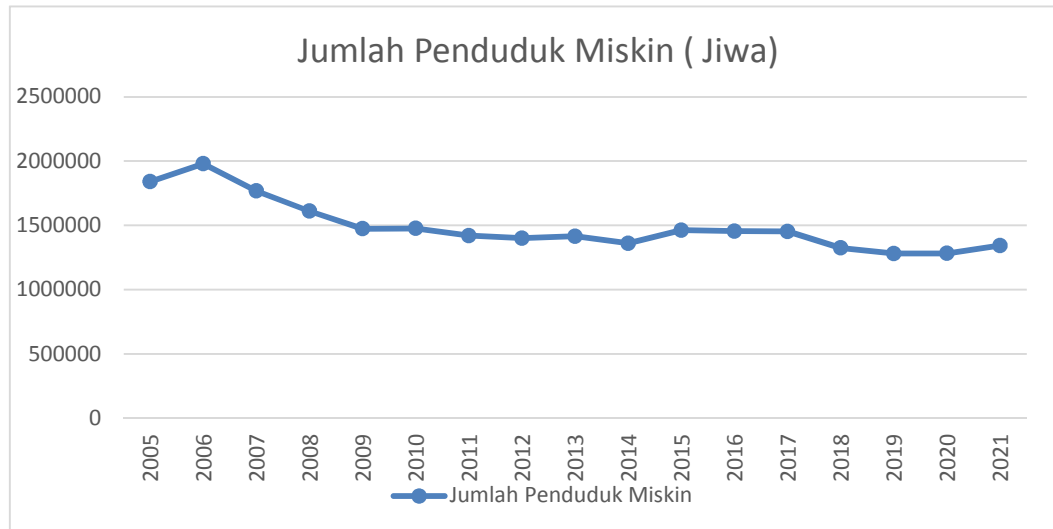
Gambar 1.3 Jumlah Angkatan Kerja di Sumatera Utara

Jumlah angkatan kerja di tahun 2009 meningkat sebesar 0,03% dibandingkan tahun 2008 yaitu dari 6.094.802 jiwa menjadi 6.298.070 jiwa, dan di tahun 2018 mencapai angka 7.124. 458 jiwa meningkat sebesar 0,056% dari tahun 2017 yaitu sebesar 6.743.277 jiwa. Dan di taun 2019 sedikit menurun menjadi 7.063.662 jiwa dan kembali meningkat hingga di tahun 2021 menjadi 7.511.006 jiwa.

Investasi juga memerlukan jumlah tenaga kerja yang cukup untuk memaksimalkan nilai output baik atas barang maupun jasa sehingga investor secara tidak langsung akan menyerap angkatan kerja untuk melakukan suatu proyek. Jumlah angkatan kerja yang cukup tinggi dapat mempengaruhi total jumlah investasi dalam negeri. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan diimbangi oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat membuat keberadaan pengetahuan dan juga keterampilan para tenaga kerja benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada.

Angkatan kerja merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian para investor. Pada hakekatnya, semakin banyak angkatan kerja yang tersedia maka akan meningkatkan penawaran angkatan kerja, sehingga suatu perusahaan atau instansi akan membayar para angkatan kerja tersebut dengan murah selama permintaan angkatan kerja masih tetap. Semakin banyak angkatan kerja yang tersedia, maka akan semakin menarik bagi investor untuk menanamkan modal, sehingga semakin banyak perusahaan atau instansi yang terbentuk.

Pada Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dari tahun 2005-2021 relatif mengalami penurunan dimana pada tahun 2006 hingga 2014 cenderung menurun. Adapun penurunan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh nilai tukar petani, upah nominal buruh yang mengalami peningkatan, menurunnya tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka (Hutabarat, 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS)

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara

Di tahun 2015 meningkat sebesar 0,075% dari 1.360.600 jiwa menjadi 1.463.660 karena didorong oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tahun 2020 jumlah penduduk miskin kembali meningkat sebesar 0,0009% dari 1.282.040 menjadi 1.283.290 hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 (Nasution, 2022 :4). Tingginya jumlah penduduk miskin di suatu daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih rendah.

Sehingga masih banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah dikarenakan faktor ekonomi, yang akan menyebabkan wawasan generasi muda kurang, karena tidak mendapat pendidikan. Maka investor pun ragu untuk melakukan investasi di daerah tersebut dikarenakan ketidakyakinan mereka melihat tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merasa tertarik untuk membahas hal tersebut dan mengangkatnya dengan judul penelitian **“Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara Tahun 2005-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menentukan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2021?
2. Bagaimanakah pengaruh Angkatan kerja terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2021?
3. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021

2. Untuk mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam melakukan kebijakan tingkat daerah ataupun tingkat nasional dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya di bidang PMDN.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan bagi setiap orang yang berkepentingan dalam hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai hal-hal terkait judul penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Investasi

Investasi merupakan suatu tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya, seperti uang, waktu atau usaha kedalam suatu asset atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa mendatang (Dwi, 2023). Investasi tentunya berperan penting dalam usaha peningkatan ekonomi di suatu negara. Dengan meningkatnya investasi akan menjamin pembangunan ekonomi lebih baik, mengurangi kemiskinan, sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menurut (Anto, 2008: 17) PMA adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaan di negara lain, sedangkan PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional.

2.1.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri meliputi investasi yang dilakukan perorangan warga negara Indonesia, Institusi Bisnis Indonesia, atau wilayahnya yang melakukan investasi atau penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. PMDN merupakan suatu kegiatan untuk membuka usaha dengan melakukan kegiatan menanam modal di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor dalam Negeri menggunakan modal dalam Negeri (Aji, 2023).

Penanaman modal dalam negeri merupakan sumber domestik adalah kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya, mencerminkan permintaan efektif, selanjutnya juga sebagai pihak yang menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses penanaman modal ini menghasilkan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya menaikkan produksi tetapi juga menambah tenaga kerja.

2.1.2 Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri

Adapun tujuan PMDN yaitu dapat menghemat devisa, mengurangi ketergantungan terhadap produk luar Negeri, memajukan industri dalam Negeri, serta memberikan kontribusi dalam menangani masalah pengangguran dengan upaya penyerapan tenaga kerja (Asiyan, 2020).

Menurut Syaharani (2011: 29) mengatakan bahwa tujuan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi nasional
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dan yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut Fuadi (2013: 16) naik turunnya PDRB menggambarkan secara jelas mengenai kondisi disuatu daerah atau regional yang berkaitan. Hal ini menyebabkan PDRB perkapita dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi investor untuk memahami kondisi daerah yang diinginkan. Pendapatan nasional dengan investasi memiliki kaitan yang erat. Secara prinsip kaitan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran investasi dapat dijelaskan bahwa investor akan menanamkan modalnya jika proyek yang dilaksanakan menguntungkan. Peningkatan pendapatan regional mencerminkan kemampuan masyarakat di dalam wilayah untuk menyerap hasil produksi, sehingga akan menarik para investor untuk meningkatkan investasinya. Selain itu tingginya pendapatan masyarakat juga mencerminkan kemampuan didalam mengembalikan modal. Hal tersebut akan menarik investor agar menanamkan modalnya dengan pertimbangan modal yang ditanamkan bisa kembali dimasa yang akan mendatang.

Menurut Rizal (2018: 34) jumlah angkatan kerja yang banyak jelas dapat mempengaruhi jumlah total investasi dalam negeri. Apabila banyak masyarakat yang bekerja maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga juga ikut menaikkan kontribusi sektoral dari masyarakat yang bekerja pada setiap lapangan usaha. Seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang dan juga penambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi sehingga pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja benar-benar diperlukan guna meningkatkan pendapatan daerah, tingginya pendapatan daerah tentunya akan menarik minat para investor ataupun perusahaan untu berinvestasi.

Faktor lainnya yang mempengaruhi investasi yaitu, jumlah penduduk miskin, dimana jika semakin tinggi jumlah penduduk miskin disuatu daerah maka akan mengindikasikan sistematika

perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja. Tentunya hal ini akan menurunkan minat para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut (Qismullah, 2019).

Menurut Desnim Silvia (2018) investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga, dimana jika tingkat bunga semakin tinggi, maka keinginan untuk melakukan kegiatan investasi semakin kecil juga. Dikarenakan seorang investor akan menambah pengeluaran jika keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana. Semakin rendah tingkat bunga, maka investor akan lebih terdorong melakukan investasi, dikarenakan biaya penggunaan dana tersebut makin kecil. Maka dari itu agar terjadi peningkatan penanaman modal atau investasi tingkat suku bunga diharapkan dapat turun atau mungkin dalam kondisi stabil. Dari pernyataan tersebut kita ketahui bahwa tingkat bunga dapat mempengaruhi tingkat investasi termasuk investasi dalam Negeri.

Infrastruktur suatu wilayah juga merupakan faktor yang mempengaruhi investasi yang kondusif seperti keadaan jalan yang bagus, adanya pelabuhan yang memadai, sumber energi tersedia didalam jika untuk kebutuhan perusahaan, adanya fasilitas transportasi yang memadai, telekomunikasi untuk membantu berjalannya kegiatan investasi.

Stabilitas politik serta keamanan juga merupakan komponen penting dalam melakukan investasi. Ketidakstabilan politik dapat mengakibatkan arah kebijakan pemerintah tidak jelas dan tidak ada tertera kepastian hukum termasuk didalamnya bidang investasi yang dapat membuat perusahaan tidak yakin untuk melakukan kegiatan investasi diwilayah tersebut karna ketidakstabilan politiknya.

2.1.4 Pihak Yang Terlibat Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 adalah:

- a) Orang perorangan warga negara Indonesia
- b) Badan Usaha Indonesia
- c) Badan Hukum Indonesia

Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:

- a) Perseroan Terbatas (PT)
- b) Commanditaire Vennootschap (CV)
- c) Firma (Fa)
- d) Badan Usaha Koperasi
- e) BUMN
- f) BUMD
- g) Perorangan

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB juga merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

PDRB merupakan komponen penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah, baik itu PDRB atas harga berlaku maupun konstan. PDRB atas harga berlaku menggambarkan

nilai tambah dari suatu barang atau jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan merupakan nilai tambah dari barang atau jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. Untuk mengetahui pendapatan rata-rata masyarakat dari suatu daerah kita dapat lihat melalui PDRB per kapita.

2.2.1 Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ada 3 pendekatan yang digunakan untuk menghitung PDRB yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Merupakan, jumlah nilai dari suatu barang atau jasa akhir yang diperoleh dari berbagai unit produksi yang berada di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut (Rini & Suguharti, 2016) Unit-unit produksi yang termasuk didalamnya:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan
- b. Penggalian dan pertambangan
- c. Industri pengolahan
- d. Pengadaan Listrik dan gas
- e. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
- f. Kontruksi
- g. Perdagangan besar dan eceran
- h. Transportasi dan pergudangan
- i. Penyediaan akomodasi dan makan minum
- j. Informasi dan komunikasi
- k. Keuangan dan asuransi
- l. Real estate

- m. Jasa perusahaan
 - n. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
 - o. Jasa pendidikan
 - p. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
 - q. Jasa lainnya
2. Pendekatan pendapatan

Merupakan, balas jasa yang dipakai oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam waktu tertentu.

3. Pendekatan pengeluaran

Yaitu, semua komponen pengeluaran di akhir seperti: konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

Dalam menentukan PDRB perkapita dimana nilai tambah bruto dari setiap sektor-sektor ekonomi yang digunakan oleh penduduk daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Artinya, jika pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dengan baik maka PDRB perkapita dapat meningkat. m

2.2.2 Pengertian PDRB per Kapita

Menurut Meitinora (2022:34) PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi disuatu wilayah pada tahun tertentu. Dimana jika semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut juga akan semakin makmur (Zasriati, 2022:46). PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat peningkatan suatu pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB

merupakan nilai bersih dari barang atau jasa akhir yang diperoleh dari berbagai macam kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode.(Rahayu, 2018:169).

2.2.3 Rumus PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai alat pengukur pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, karena lebih menggambarkan mengenai nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing individu disuatu daerah (Ariansyah, 2017).

2.2.4 Tujuan PDRB Per Kapita

Adapun yang menjadi tujuan dari pengukuran pendapatan perkapita adalah untuk memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu di suatu daerah. Daerah dengan pendapatan perkapita yang tinggi cenderung memiliki kualitas hidup yang baik, seperti akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, pengukuran pendapatan perkapita juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antar daerah yang berbeda.

2.3 Angkatan Kerja

2.3.1 Pengertian Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk atau masyarakat usia kerja yaitu usia 15 tahun dan lebih yang bekerja, ataupun mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Angkatan kerja ini mencakup orang-orang dewasa yang bekerja dan tidak bekerja. Dapat disebut tidak

menganggur jika angkatan kerja mempunyai kemampuan dan siap kerja serta harus mempunyai upaya untuk mencari pekerjaan dalam empat minggu terakhir. Himo et al (2022)

Jumlah angkatan kerja merupakan faktor positif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana jika tingkat angkatan kerja yang bekerja semakin banyak maka semakin besar pula tingkat produksi yang dihasilkan dan berpengaruh terhadap naiknya pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angkatan kerja semakin banyak juga tenaga kerja yang produktif.

Adapun nilai atau angka yang dipakai untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Jika penambahan angkatan kerja seiring bertambahnya partisipasi masyarakat yang bekerja, peristiwa ini berarti peningkatan TPAK yang diiringi dengan penurunan partisipasi penduduk yang bekerja, ini menandakan bahwa penyebab tingginya TPAK adalah meningkatnya masyarakat yang mencari pekerjaan.

Menurut Adriyanto (2020:72–73) angkatan kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Angkatan kerja yang digolongkan sebagai pekerja, merupakan angkatan kerja yang memiliki ciri-ciri:
 - Dalam satu minggu sebelum terdapat perhitungan melakukan suatu pekerjaan dalam mendapatkan penghasilan yang lamanya antara satu jam dalam seminggu yang lalu
 - Mereka yang seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan suatu pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, contohnya: pegawai swasta/pemerintah, pekerjaan tetap yang bersamaan tidak masuk dikarenakan sakit, melakukan cuti, mogok atau juga perusahaan memberhentikan aktivitasnya selama sementara.
- b. Angkatan kerja yang digolongkan menganggur dan sedang mencari pekerjaan adalah angkatan kerja yang memiliki ciri-ciri:

- Belum memiliki pekerjaan sebelumnya, tetapi sedang dalam proses mencari pekerjaan
- Posisi sedang bekerja, tetapi ada pencacahan menganggur dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan
- Mereka yang diberi kebebasan dalam bertugas dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan

Permasalahan yang sering muncul dalam ketenagakerjaan adalah adanya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) dan permintaan tenaga kerja (*demand for labor*). Akan tetapi faktanya yang terjadi adanya kelebihan penawaran tenaga kerja pada suatu jenis pekerjaan. Artinya, pada tingkat upah tertentu dalam suatu pekerjaan tertentu jumlah orang yang memberikan tenaganya untuk bekerja lebih banyak daripada jumlah yang diminta untuk bekerja.

2.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Angka kelahiran yang tinggi merupakan salah satu penyebab laju pertumbuhan penduduk di suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi maka akan mengakibatkan tingkat kemiskinan semakin meningkat.

Menurut Adawiyah (2020) konsep dari kemiskinan berdasarkan pola waktu dapat dibedakan menjadi:

- a. Kemiskinan yang sudah kronis ataupun turun temurun, biasanya daerah seperti ini merupakan daerah yang dimana sumber daya alamnya masih sangat kurang (kritis)
- b. Kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan
- c. Kemiskinan musiman, musiman yang dimaksud seperti yang dialami oleh nelayan ataupun petani.
- d. Kemiskinan yang terjadi karena adanya bencana alam atau dampak dari kebijakan tertentu yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

2.4.1 Pengertian Penduduk Miskin

Menurut Tumaleno (2022:13) kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang dilihat dari segi pengeluaran. Maka, jumlah penduduk miskin merupakan jumlah penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapitanya perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah representasi dari rupiah yang dibutuhkan atau harga yang dibayarkan supaya penduduk dapat hidup dengan layak secara minimum yang dimana didalamnya termasuk pemenuhan kebutuhan akan makanan dan minuman dan juga non makan essential. Garis kemiskinan merupakan nilai tambah dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

2.4.2 Faktor penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin yaitu:

1. Faktor individual, menyangkut kondisi fisik maupun psikologis individu yang miskin disebabkan karena perilaku, pilihan dan kemampuan dari seseorang yang miskin itu dalam menjalani kehidupan
2. Faktor sosial, dampak dari kondisi lingkungan yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Contohnya: diskriminasi usia, gender, etnis atau ras yang menyebabkan seseorang susah untuk mendapatkan penghasilan. Kondisi sosial keluarga seseorang yang menyebabkan generasi turun temurun menjadi miskin.
3. Faktor kultural, keadaan atau kualitas budaya yang mengakibatkan kemiskinan. Biasanya merujuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya miskin sebagai kebiasaan hidup ditimbulkan karena kebiasaan tersendiri dari sikap seseorang yang malas, menyerah pada nasib atau fatalism dan tidak mempunyai jiwa wirausaha.
4. Faktor struktural, hal ini berkaitan dengan sistem yang tidak adil sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contohnya, system ekonomi neoliberalisme yang ada di Indonesia yang membuat para nelayan, petani terjerat oleh pajak dan juga iklim investasi yang lebih menguntungkan pihak orang kaya dan investor asing. (Adawiyah, 2020: 46)

2.4.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, adapun penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin guna untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin dengan menggunakan pola atau keterampilan membuka usaha bagi pemula dan memberikan bantuan untuk modal awal.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan bagi usaha mikro dan kecil dilakukan dengan membuat program/kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi pengembangan kewirausahaan, pemberdayaan dan juga pendampingan berkelanjutan, serta stabilisasi usaha dan juga fasilitasi pemasaran.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas dokumen perencanaan hingga monitoring dan juga evaluasi serta pengembangan kemitraan dengan melibatkan perguruan tinggi dengan Perusahaan/BUMN/BUMD, dan juga mendorong pembangunan dikawasan perdesaan.

2.5 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.5.1 Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto perkapita dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

PDRB per kapita merupakan suatu indikator untuk melihat daya beli di suatu daerah. Tingginya pendapatan perkapita di suatu daerah menandakan bahwa daya beli masyarakat daerah tersebut juga tinggi. Hal ini berarti menunjukkan pasar domestik yang efektif terutama untuk berinvestasi. Oleh karena itu pendapatan perkapita suatu daerah juga merupakan salah satu yang dipertimbangkan oleh investor untuk berinvestasi (Kusreni, 2013: 131).

PDRB memiliki hubungan yang positif dengan PMDN, apabila PDRB mengalami peningkatan maka dapat mendorong investasi dalam negeri juga ikut meningkat, sehingga disimpulkan bahwa jika tingkat PDRB disuatu wilayah meningkat maka mampu menarik minat para investor di daerah tersebut (Erdiyani, 2019: 48)

2.5.2 Hubungan antara angkatan kerja dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Apabila jumlah angkatan kerja tinggi dan didukung dengan skill serta kemampuan untuk meningkatkan produksi suatu barang ataupun jasa maka secara tidak langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pengeluaran masyarakat semakin banyak dikarenakan peningkatan produksi suatu barang atau jasa sehingga penanaman modal juga ikut mengalami peningkatan (Hasibuan,2022).

Jika terjadinya peningkatan pada jumlah angkatan kerja maka juga dapat meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut nantinya akan membuat peningkatan juga pada investasi, jadi angkatan kerja memiliki hubungan positif terhadap investasi yaitu semakin banyak jumlah angkatan kerja semakin besar pula peluang untuk meningkatkan investasi (Rizal, 2018)

2.5.3 Hubungan antara jumlah penduduk miskin terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Rendahnya penghasilan masyarakat disebabkan rendahnya produktivitas sebagai manifestasi pembentukan modal sangat sedikit, keterbatasan pembentukan modal ini merupakan dampak dari kurangnya faktor pendorong untuk menanamkan modal (investasi) (Aulia, 2023:13). Jika tingkat kemiskinan menurun atau rendah maka investasi akan meningkat namun sebaliknya jika tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin bertambah maka investasi atau penanaman modal dalam Negeri akan menurun karena kurangnya minat perusahaan melakukan investasi di daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, yang membuat mereka tidak yakin mendapatkan keuntungan jika melakukan investasi.

2.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Silviana, 2022)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Tenaga Kerja Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Pati Tahun 2011-2020	Menggunakan metode analisis regresi linear berganda	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Pati tahun 2011-2020 Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Pati tahun 2011-2020 Tenaga kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Pati tahun 2011-2020
2	(Qismullah, 2019)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto	Menggunakan metode analisis regresi linear berganda	Secara simultan, variabel Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk miskin dan jumlah

		(PDRB), Jumlah Penduduk Miskin & Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Investasi Sektor Pariwisata Halal di Provinsi Aceh		kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap investor sektor pariwisata halal di Aceh pada tahun 2010-2019 Secara parsial, variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi sektor pariwisata halal di provinsi Aceh pada tahun 2010-2019 adalah variabel IPM (X1), PDRB (X2) dan jumlah kunjungan wisatawan (X4)
3	(Damanik, 2018)	Analisis Pengaruh PDRB per Kapita, Suku Bunga Pinjaman dan Angkatan Kerja (Economically Active) Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Enam Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2000-2016	Menggunakan metode analisis regresi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2000-2016 Suku bunga pinjaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di enam kota di Sumatera Utara tahun 2000-2016

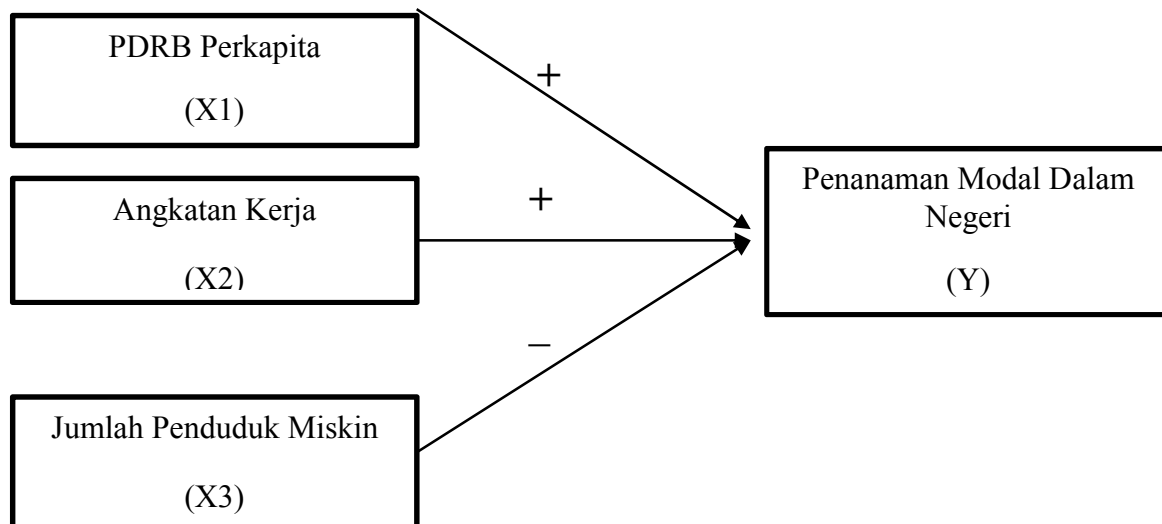
				Angkatan kerja (Economically Active) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Enam kota di Sumatera Utara Tahun 2000-2016
4	(Eriyani: 2019)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Investasi Di Sulawesi Selatan	Menggunakan metode analisis regresi linear berganda	Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap investasi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1996-2015 Tingkat suku bunga kredit investasi tidak berpengaruh terhadap investasi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1996-2015

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini mempunyai tiga variabel independen yaitu: PDRB Perkapita, Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk Miskin dan satu variabel dependen yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi pada dasarnya merupakan kegiatan awal pembangunan ekonomi, investasi bisa dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah atau juga kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta.

Jika investasi mengalami peningkatan maka dapat meningkatkan pendapatan daerah dan, dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang diperoleh melalui investasi dari pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk memperjelas pemikiran dalam penelitian ini, berikut gambar kerangka pemikiran:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap pertanyaan dari penelitian. Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021
2. Angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021

3. Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh PDRB perkapita, angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk skala numerik (angka) dengan jenis data runtut waktu (*times series*) selama kurun waktu 17 tahun pada periode 2005-2021 yaitu data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), PDRB per kapita, angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin di Sumatra Utara. Sumber data diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), browsing internet, serta berbagai laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yakni BPS, browsing internet, berbagai laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini serta menggabungkan teori-teori yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear berganda dalam bentuk data series, dengan metode analisis data sebagai berikut:

3.4.1 Metode Ekonometrik

Metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh PDRB perkapita, angkatan kerja, jumlah penduduk miskin terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatra Utara tahun 2005-2021 adalah model ekonometrik. Penggunaan model ekonometrik dalam analisis struktural dimaksudkan untuk mengukur besaran kuantitatif hubungan variabel-variabel ekonomi dengan menggunakan model regresi linier berganda.

3.4.2 Pendugaan Model Ekonometrik

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linear berganda. Model persamaan regresi linear berganda (persamaan regresi sampel) adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i} + \varepsilon_i : i = 1, 2, 3, \dots, n$$

dimana :

Y = Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara (ribu/rupiah)

X1 = PDRB perkapita di Sumatera Utara (rupiah)

X2 = Angkatan Kerja di Sumatera Utara (jiwa)

X3 = Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara (jiwa)

$\hat{\beta}_0$ = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ = Koefisien regresi

ε = Galat (*error term*)

i = Jumlah data pengamatan

3.5 Uji Kebaikan Suai: Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh keragaman variabel tak bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 antara nol dan satu. Jika, nilai R^2 yang lebih kecil atau mendekati nol, artinya kemampuan variabel-variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas (dependen) sangat terbatas dan jika nilai R^2 yang besar

mendekati satu, artinya variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas. Rumusnya adalah:

$$R^2 = \frac{JKR}{JKG} = 100\%$$

Dimana:

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKT : Jumlah Kuadrat Total

3.6 Pengujian Hipotesis

Uji statistik digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing koefisien dari variabel bebas secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji secara parsial (uji-t) dan uji serentak (uji-F).

3.6.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas (PDRB perkapita, angkatan kerja, jumlah penduduk miskin) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (penanaman modal dalam Negeri) dengan taraf nyata menggunakan $\alpha = 5\%$

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah:

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{S(\hat{\beta}_i)} ; i = 1,2,3$$

$\hat{\beta}_i$: Koefisien regresi

β_i : Parameter

$S(\hat{\beta}_i)$: Simpangan baku

1. PDRB Perkapita (X_1)

$H_0: \beta_1 = 0$, artinya PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021.

$H_1: \beta_1 > 0$, artinya PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021.

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya PDRB Perkapita secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya PDRB perkapita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021.

2. Angkatan Kerja (X_2)

$H_0: \beta_2 = 0$, artinya angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021.

$H_1: \beta_2 > 0$, artinya angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021.

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya angkatan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara tahun 2005-2021. Jika, nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Artinya angkatan kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021.

3. Jumlah Penduduk Miskin (X_3)

$H_0: \beta_3 = 0$, artinya jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara tahun 2005-2021.

$H_1: \beta_3 < 0$, artinya jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021.

Apabila, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, jumlah penduduk miskin secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021. Jika, nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya jumlah penduduk miskin secara parsial tidak signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara tahun 2005-2021.

Adapun kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika probabilitas (signifikan) $< \alpha = 0,05$, dimana α adalah besarnya kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan) $> \alpha = 0,05$, dimana α adalah besarnya kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan keputusan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

3.6.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui proporsi dari variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara bersamaan. Uji F bertujuan untuk menguji apakah keseluruhan variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas.

1. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut: $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya variabel bebas secara bersamaan/keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
 $H_1 : \beta_i$ tidak semua nol, $i = 1,2,3$, artinya variabel bebas secara bersamaan/keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. Mencari nilai F_{hitung} ada nilai kritis F statistic dari table F. Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk numerator ($k-1$) dan dan df untuk denominator ($n-k$).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah:

$$F_{hitung} = \frac{JKR (k-1)}{JKG(n-k)}$$

Dimana:

JKR = Jumlah Kuadrat Regresi

JKG = Jumlah Kuadrat Galat

k = Banyaknya koefisien regresi

n = Banyaknya sampel

Apabila nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka, H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikoleniaritas merupakan sebuah keadaan yang menyatakan bahwa adanya korelasi atau hubungan yang kuat antar dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Uji multikolinearitas berfungsi untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran:

- a. Nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar
- b. Karena galat bakunya besar sehingga kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji t
- c. Uji t tidak dapat dipakai untuk menguji seluruh hasil taksiran
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori

Menurut Widarjono (2013:104) ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai Tolerance (T). Jika nilai $VIF \leq 10$ dan nilai $T \geq 0,10$ maka, tidak terjadi multikolinearitas.

3.7.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi ada atau tidak korelasi antar kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan penggunaan periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

A. Uji Durbin Watson (uji D-W)

Menurut Ghozali (2013: 107) Uji Durbin Watson digunakan dengan membandingkan DW_{hitung} dengan DW_{table} . Apabila terdapat autokorelasi positif maka galat tidak lagi

minim sehingga penduga parameter tidak lagi efisien. Secara umum dapat diambil patokan:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. $0 < d < dL$ | Menolak H_0 , berarti ada autokorelasi positif |
| 2. $dL \leq d \leq dU$ | Daerah keraguan, berarti tidak ada keputusan |
| 3. $dU < d < 4 - dU$ | Gagal menolak H_0 , tidak ada korelasi
(positif/negatif) |
| 4. $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ | Daerah keraguan, berarti tidak ada keputusan |
| 5. $4 - dL < d < 4$ | Menolak H_0 berarti ada autokorelasi negatif |

Jika dalam Uji Durbin Watson tidak ada keputusan maka untuk memastikan lebih lanjut ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi dapat juga menggunakan uji Run. Uji Run adalah bagian dari statistika nonparametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara galat terdapat korelasi yang tinggi. Apabila antara galat / residu tidak terdapat hubungan korelasi maka dapat dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara acak atau sistematis.

Adapun cara yang digunakan dalam uji Run adalah:

H_0 : Galat (res_1) acak (random)

H_1 : Galat (res_1) tidak acak

Agar dapat mengetahui ada tidaknya autokorelasi menggunakan uji runs dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka terdapat gejala autokorelasi atau residual tidak acak
2. Sebaliknya, apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka tidak terdapat gejala autokorelasi atau residual acak

3.7.3 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan bantuan dari program statistik. Kolmogorov Smirnov menggunakan bantuan program statistik.

1. Analisis Grafik

Dapat menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya yaitu dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal maka garis yang menggambarkan batas sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

2. Analisis Statistik

Menurut Ghozila dalam bahwa, “untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain, yaitu uji statistic nonparametrik Kolmogorof Sminov (K-S)”. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis seperti berikut:

H_0 : Data galat (residu) menyebar normal

H_1 : Data galat tidak menyebar normal

Dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Apabila nilai sig. lebih dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal.

2. Apabila nilai sig. kurang dari 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

3.8 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (Y)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Sumatera Utara yang dilakukan oleh penanam modal dalam Negeri dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam Negeri yang diukur dengan satuan ribu/rupiah per tahun

2. PDRB Per Kapita (X1)

PDRB per kapita adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di Sumatera Utara dengan satuan rupiah, dimana jika PDRB ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut maka akan menghasilkan pendapatan perkapita dalam satuan rupiah/tahun.

3. Angkatan Kerja (X2)

Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun dan lebih yang sedang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Data yang digunakan adalah satuan jiwa per tahun.

4. Jumlah Penduduk Miskin (X3)

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Data yang digunakan adalah satuan jiwa per tahun.

